

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Walhi mampu menjalankan perannya dengan baik sebagai political entrepreneur, hal ini terlihat dari berbagai keterlibatannya dalam menolak rencana pembangunan pabrik semen, di beberapa wilayah yang kiranya mampu merusak ekosistem dari kawasan karst di Indonesia. Selain itu Walhi juga mampu menekan pemerintah untuk tetap menjalankan komitmennya terhadap regulasi yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi maladministrasi ataupun cacat hukum.

Penelitian ini menggunakan teori “Transnational Advocacy Network” guna menganalisa bagaimana peran Walhi dalam mengadvokasi isu karst serta masyarakat yang ada disekitarnya, dan pada akhirnya penelitian ini mencoba menjelaskan apa saja yang menjadi pencapaian Walhi dalam advokasi kawasan karst yang dilakukan bersama jaringan aktivis lingkungan yang lain ataupun masyarakat yang turut serta dalam memperjuangkan isu tersebut.

Terkait Leverage Politic, Walhi mengajak berbagai macam lapisan kelompok guna bergabung dalam mempersoalkan isu karst selain itu Walhi juga mencoba membangun sinergisitas didalam langkah advokasi kawasan karst, sehingga gerakan yang dilakukan sifatnya lebih masif dan terstruktur, hal itupun diwujudkan melalui berbagai agenda konsolidasi Walhi.

Didalam taktik *Information Politics*, Walhi cukup baik, mengingat bagaimana jaringan yang dibangun oleh walhi baik itu sifatnya melalui undangan ataupun agenda terbuka untuk umum, Walhi kerap menjadi sorotan didalam isu

lingkungan di Indonesia, selain itu informasi yang disajikan oleh Walhi bersifat akar rumput, sehingga informasi yang didapatkan dari Walhi seringkali yang sifatnya melalui hasil penyelidikan dari kelompok Walhi sendiri.

Untuk *Symbolic Politics*, Walhi seringkali menyelipkannya dalam berbagai agenda baik itu didalam aksi ataupun agenda - agenda lainnya, “*jargon Jaga Karst Jaga Kehidupan*” menjadi representatif utama akan urgensi karst di Indonesia maupun ditingkat global. Aksi semen kakipun cukup membekas diingatan masyarakat secara umum, terkhusus aktivis lingkungan, mengingat aksi tersebut dilakukan dalam waktu yang cukup lama.

Sedangkan untuk *Accountability Politics*, ada beberapa isu yang Walhi belum sepenuhnya bisa dikatakan berhasil, mengingat beberapa tuntutan masih harus menunggu putusan pengadilan, ataupun sikap resmi dari pihak pemerintah untuk menolak atau menerima tuntutan dari Walhi.

Langkah advokasi Walhi dikawasan karst terkait penolakan industri ekstraktif terkhusus industri semen dirasa cukup penting, mengingat hal tersebut tidak hanya berbahaya bagi kondisi lingkungan Indonesia secara menyeluruh yang mana hal tersebut merupakan bentuk lanjutan dari komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon namun juga untuk menjaga kestabilan perekonomian diranah industri semen, mengingat kondisi over produksi tidak hanya buruk untuk saat ini, namun juga dimasa yang akan datang, karena produk semen bukan merupakan produk yang dapat disafe dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Rekomendasi

Mengingat ada beberapa tuntutan yang belum mendapatkan hasil akhir, maka penulis merekomendasikan terhadap penelitian – penelitian selanjutnya untuk membahas terkait hasil putusan dari tuntutan tersebut, serta bagaimana pemenuhan kebutuhan hukum terkait wilayah karst di beberapa wilayah diberlakukan, hal tersebut cukup menarik bagaimana peran Walhi dalam menolak eksploitasi kawasan karst dari pihak industri semen.

